KETERBUKAAN INFORMASI: Wali Nagari Kamang Hilia Khudri (kanan) menjelaskan pemanfaatan dana desa kepada pelajar di Desa Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pekan lalu. Pemanfaatan dana desa secara transparan dibeberkan di ruang publik, laporannya dipajang di depan kantor desa.

MI/YOSE HENDRA

Libatkan Masyarakat, Wali Nagari Bangun Desa Antikorupsi

Transparansi digelar wali nagari secara formal dan informal. Ia mengundang pemangku kepentingan dalam rapat, juga mengajak warga bicara di lepau.

Yose Hendra
yose@mediaindonesia.com

HARI masih pagi saat Khudril Elhami memulai hari. Saat kabut masih mengepung, ia sudah melangkah keluar rumah.

Elhami ialah Wali Nagari atau Kepala Desa Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat. Hari itu, seperti hari-hari yang sudah ia lalui, Elhami tidak langsung menuju kantornya.

Ia bergegas menuju lepau atau warung. Di sana ia minum kopi sembari sarapan.

Namun, itu bukan tujuan utamanya. "Lepau adalah ruang kantor nonformal. Saya menemui warga yang ada di sana, berinteraksi dengan mereka, siap untuk dikritik dan menerima sumbang saran," ujar Khudri.

Di lepau, siapa pun yang tengah minum kopi, bebas bicara, bebas bertanya. Khudri mengaku tidak risih jika pertanyaan warga juga menyangkut dana desa dan pembangunan nagari.

"Jika lepau tidak dimanfaatkan, timpang jalannya pemerintahan nagari. Lepau ruang pemberi informasi dalam pelayanan yang mesti kami lakukan," tambahnya.

Banyak hal yang ditanyakan warga saat Khudri ada di lepau sejak pukul 06.30 WIB hingga menjelang ia harus masuk kantor pada 08.00 WIB. "Mulai dari pembuatan surat tidak mampu karena anak yang tengah sekolah butuh beasiswa untuk membantu biaya pendidikan," ungkap Khudri.

Sehabis minum kopi, dia bertolak ke kantor wali nagari yang terletak di Jorong IV Kampuang. Warga yang hendak berurusan dengan kantor desa akan disambut gapura dengan pajangan baliho berukuran 2x4 meter. Satu baliho memuat realisasi anggaran tahun lalu dan baliho kedua membeberkan anggaran tahun berjalan.

Baliho juga dipasang di beberapa titik keramaian desa, terutama bisa ditemukan di lokasi proyek pembangunan. Di baliho terpampang nama pembangunan (kegiatan), total anggaran, dan total volume. Semuanya merupakan informasi keterbukaan pembangunan desa.

Keterbukaan informasi

"Sumber dana pembangunan, saat ini, didominasi dana desa. Karena itu, penting soal keterbukaan pada masyarakat," ujar Khudri.

Rata-rata setiap tahun, Nagari Kamang Hilia mendapatkan siraman dana desa sebesar Rp800 juta.

Pelibatan masyarakat dalam roda pemerintahan di Nagari Kamang Hilia tidak dibuat dadakan. Partisipasi sudah menjadi kebiasaan, sudah membudaya.

Keterbukaan informasi sudah berjalan jauh sebelum desa tersebut masuk nominasi percontohan Desa Antikorupsi 2022 yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Khudri, sebelum diumumkan sebagai salah satu kandidat desa antikorupsi, lembaga antirasuah itu sudah lebih dulu melakukan ekspos di daerahnya. Setidaknya ada lima komponen dengan 18 indikator yang harus dipenuhi desanya.

Adapun komponen-komponen itu, antara lain penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

Dari lima komponen tersebut, sebut Khudri, pihaknya tidak mengetahui persis komponen mana saja yang memiliki nilai baik. Namun, ia meyakini keterlibatan masyarakat melalui lembaga adat dan lembaga nagari di daerah itu menjadi nilai lebih bagi Nagari Kamang Hilia sehingga terpilih menjadi Percontohan Desa Antikorupsi 2022.

"Mulai dari perencanaan, kami selalu melibatkan masyarakat, baik tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, maupun perempuan. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya pun kami tetap melibatkan masyarakat nagari," terang Khudri.

Keterlibatan masyarakat secara informal terjadi di ruang publik seperti surau dan lepau. Adapun formalnya melalui lembaga-lembaga yang kemudian berhimpun menjadi Badan Musyawarah (Bamus) Nagari.

Bamus Nagari punya fungsi menetapkan peraturan nagari bersama wali nagari. Mereka menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja wali nagari.

Anggota Bamus Nagari berjumlah tujuh orang yang dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat dari 17 jorong yang mempunyai hak pilih. Unsur masyarakat tersebut, antara lain ninik mamak (kaum adat), cerdik pandai (kaum intelektual), ulama, *bundo kanduang* (perempuan), dan pemuda.

Di Nagari Kamang Hilia, semua unsur masyarakat yang terhimpun dalam Bamus Nagari itu dilibatkan dalam proses kegiatan nagari, dari perencanaan hingga proses pelaksanaan kegiatan.

"Selain memasang baliho laporan pemanfaatan anggaran di tempat umum, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Itu adalah kunci dari prinsip keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang berjalan di Kamang Hilia," tegas Khudri.

Semua dilibatkan

Khudri mengaku tak punya inovasi menonjol dalam tata kelola pemerintahan. Namun, pada semua kegiatan yang dibiayai dana nagari, masyarakat selalu terlibat.

"Itu visi konsep nagari mambangun, bukan membangun nagari. Kalau membangun nagari, masyarakat hanya ikut gotong royong, tidak terlibat dalam proses anggaran," jelasnya.

Di desa tersebut, masyarakat benar-benar dilibatkan. Di wilayah lain, laporan pertanggungjawaban kepala desa cukup disampaikan ke bamus atau bupati. Di Kamang Hilia, Khudri memilih menggelar musyawarah nagari, warga bisa bertanya soal laporan pertanggungjawaban pembangunan.

Menurut Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kamang Hilia Zulharli Dt Kayo, terpilihnya Kamang Hilia sebagai Percontohan Desa Antikorupsi oleh KPK merupakan hasil kerja sama yang kuat seluruh masyarakat. "Saya merasakan sendiri pelayanan publik diberikan secara maksimal oleh pemerintahan nagari. Semua dilibatkan, termasuk Kerapatan Adat Nagari." (N-2)

Penuh Kejutan, Tampil Apa Adanya

TAHUN ini menjadi tahun yang istimewa bagi warga Kamang Hilia dan Khudri Elhami. Pada awal Juni, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan desa di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, itu menjadi Percontohan Desa Antikorupsi 2022.

Khudri, sang Kepala Desa atau Wali Nagari, terkejut saat mendapat informasi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari bahwa desanya terpilih. Jauh dari dugaan karena Pemerintah Kabupaten Agam sebenarnya mengajukan Nagari Pasia Laweh di Kecamatan Palupuh ke KPK.

Nagari Pasia Laweh menjadi satu-satunya desa yang diajukan. Namun, KPK meminta ada desa pembanding.

"Kami menampilkan apa adanya. Apa yang dikerjakan di nagari ini selama empat tahun saya memimpin," ungkap Khudri.

KPK pun ternyata memilih Nagari Kamang Hilia, sang pembanding. Sebelumnya, desa itu juga sudah mengantongi penghargaan dalam evaluasi kinerja anggaran. Pada 2022, penghargaan diberikan dalam bentuk dana sebesar Rp210 juta.

Adat Minangkabau

Kamang Hilia merupakan desa yang terhampar di kaki pegunungan Bukit Barisan. Wilayahnya berjarak 71 kilometer dari Lubuk Basung, ibu kota Kabupaten Agam. Cukup jauh. Desa tersebut justru lebih dekat dengan Kota Bukittinggi yang hanya berjarak sekitar 14 km.

Pada 2020, populasi penduduk Kamang Hilia tercatat sebanyak 5.526 jiwa. Mereka tersebar di 17 jorong atau setingkat dusun.

Secara umum, mereka yang tinggal di Kamang Hilia ialah etnik Minang. Nilai-nilai adat Minangkabau juga menyelimuti tata kehidupan di Kamang Hilia.

Dalam kepemimpinan, mungkin paling gamblang. Pemimpin hanya ditinggikan seranting, didahulukan selangkah.

Ini filosofis kepemimpinan di Minangkabau. Namun, di Kamang Hilia itu menjadi pendulum kepemimpinan bernuansa egaliter yang menggerakkan akuntabilitas pada roda pemerintahan dan pembangunan.

Makna pemimpin ditinggikan seranting ialah sang pemimpin begitu dekat dengan rakyat yang dia pimpin. Rakyat akan mendengarkan bila ia bicara, tanpa harus ada perantara.

Sementara itu, didahulukan selangkah mengandung makna jika sang pemimpin salah dalam melangkah, rakyat akan segera memberi tahu agar sang pemimpin membetulkan langkahnya. Itu akan membuat rakyat dan pemimpin berjalan seirama.

"Saya tidak ingin menjadi wali nagari yang eksklusif. Kapan pun harus memberikan layanan, saya pasti berikan," ucap Khudri.

Ketua Pemuda Nagari Kamang Hilia Fredo Pangulu mengakui mudahnya berkomunikasi dengan aparatur nagari, termasuk dalam urusan pendanaan.

"Kami pernah mengajukan bantuan anggaran mesin jahit untuk anak-anak muda. Tidak rumit. Kami mendapat dua mesin jahit pada 2020 lalu."

Senada, Zulharli Dt Kayo, tokoh warga, mengakui pelayanan publik di Kamang Hilia dilandasi duduk bersama-sama. "Kuncinya saling mengingatkan." (Yose Hendra/N-2)

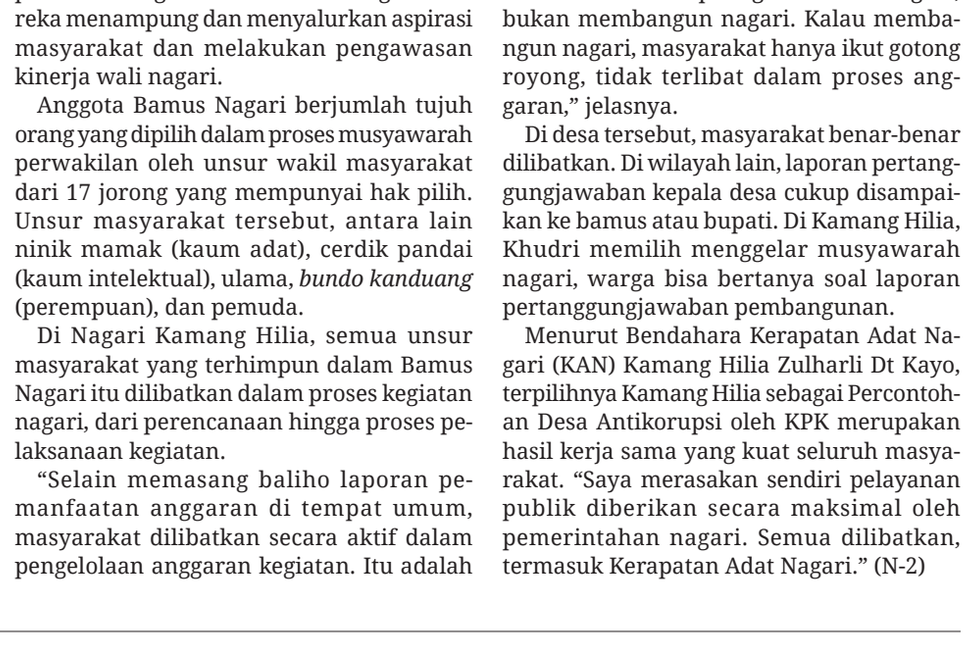

MI/YOSE HENDRA

TRANSPARANSI PROYEK: Wali Nagari Kamang Hilia Khudri (kiri) tengah meninjau proyek pembangunan yang sedang berjalan di Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pekan lalu. Pengerjaan proyek dilakukan secara terbuka dan transparan.